



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EMY YUSLIHAH
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3. NHK : 869374

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.105.000.000**

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 126 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 274 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
5. Tanah Seluas 165 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 165.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **451.500.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA MANUAL Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR MATIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **22.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	133.083.390
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.712.083.390
III. HUTANG	Rp.	543.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.169.083.390

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.